

# DINAMIKA PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG TANGGUH

Oleh : **Muhammad \***

## Pendahuluan

*Secara teoritis, partai politik berada pada posisi Input dan Konversi. Posisi Input dalam arti mengagregasikan kepentingan masyarakat yang diwakilinya sedangkan pada posisi Konversi partai politik mengartikulasikan kepentingan masyarakat, hal ini terjadi melalui mekanisme pemilihan umum yang mendudukkan wakilnya di lembaga legislatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya agar menjadi produk kebijakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dan anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.*

\* Dosen Ilmu Politik Fisip Unhas dan sekarang menjabat Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisip Unhas



Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, atau duduk dalam lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi dan sebagainya.

Secara defenisi menurut Jean Blondel (1995), partai politik adalah sekelompok keanggotaan terbuka dan fokus dengan spektrum soal-soal kebijakan. Carl Friedrich (1967), partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang idiil dan materiil, partai politik merupakan sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip tertentu untuk melayani kepentingan nasional.

Berdasarkan defenisi-defenisi tersebut di atas menunjukkan pengertian yang beragam. Tetapi untuk memudahkan pemahaman mengenai partai politik atau setiap organisasi terkategori sebagai partai politik, apabila : Pertama, terwujud dalam identitas, dapat berupa nama, bendera dan yang terpenting ideologi yang menjadi dasar nilai bagi pedoman dan aktivitas partai politik ; Kedua, ketika sekelompok orang-orang bergabung tentunya bukan sekedar kumpulan biasa, tetapi sebagai kelompok yang terorganisasi, artinya mereka membentuk asosiasi yang memenuhi syarat-syarat organisasi ; Ketiga, keberadaan partai politik diakui memiliki hak oleh sebagian besar masyarakat untuk mengorganisasikan dirinya, sekaligus mengembangkan dirinya dengan berbagai aktivitas. Secara sederhana, partai politik bisa mengatasnamakan kelompok masyarakat

tertentu yang merupakan pendukung atau anggota-anggotanya ; Keempat, partai politik berupaya mengembangkan aktivitas-aktivitas melalui mekanisme kerja yang mencerminkan pilihan rakyat. Partai politik dalam berbagai kegiatan, bekerja berdasarkan prinsip representatif government atau pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat. Hal ini dimungkinkan oleh keberadaan partai politik yang harus selalu berhubungan dengan rakyat. Dengan posisi seperti ini, partai politik diharuskan mengembangkan mekanisme hubungan yang aspiratif, responsif, dan partisipatif terhadap rakyat terutama pendukungnya, sehingga apapun yang menjadi aktivitas politik partai merupakan gambaran suara rakyat ; Kelima, aktivitas inti partai politik adalah melakukan seleksi bagi rakyat, baik dari kalangan partai politik maupun di luar partai politik yang dipilih sebagai kandidat untuk menduduki jabatan-jabatan publik dalam pemerintahan. Partai politik pada hakekatnya merupakan sekelompok warga negara yang sedikit banyak telah terorganisir, dimana anggota-anggotanya (anggota-anggota dari kelompok yang telah terorganisir itu) memiliki cita-cita, tujuan-tujuan dan orientasi yang sama. Kelompok ini berusaha untuk merebut dukungan rakyat, sedangkan yang menjaditujuannya adalah memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan, dan kemudian berusaha untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya (kebijaksanaan kebijaksanaan kelompok) dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya didalam jabatan-jabatan politik atau pemerintahan. Mengenai cara-cara yang dipergunakan partai politik agar dapat memperoleh kekuasaan dan kemudian menduduki jabatan-jabatan politik atau pemerintahan adalah dengan melalui (biasanya) cara yang konstitusional, seperti ikut serta dalam pemilihan umum ; maupun dengan melalui (jarang sekali terjadi) cara yang konstitusional, seperti mengadakan pemberontakan.

Perlu pula mendapat perhatian bahwa partai politik tidak begitu mudah untuk dibedakan dengan kelompok kepentingan yang terorganisir secara rapi. Walaupun diantara keduanya tidak mudah dibedakan, namun terdapat satu perbedaan yang



nampaknya secara umum dapat diterima. Suatu kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan pada waktu yang sama dan berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar berusaha untuk menguasai jabatan-jabatan publik. Walaupun didalam kenyataannya perbedaan antara partai politik dengan kelompok kepentingan tidak setegas itu. Perbedaan yang sama sekali tidak jelas antara partai politik dengan kelompok kepentingan ini juga dinyatakan oleh David F Roth dan Frank L. Wilson. Dalam hal ini beliau menyatakan pendapatnya bahwa perbedaan yang paling penting adalah bahwa partai politik berusaha mencari kekuasaan melalui pemilihan-pemilihan atau cara-cara yang lain untuk dapat menduduki jabatan-jabatan publik; sementara itu kelompok kepentingan pada umumnya hanya berusaha mencoba mempengaruhi para pemegang kekuasaan<sup>1</sup>.

Partai politik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya harus mempertimbangkan kelompok-kelompok yang terdapat didalamnya dan tujuan-tujuan yang akan dicapainya. Suatu partai politik yang Revolusioner dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, tentu akan menempuh cara-cara yang berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh partai politik yang konservatif. Partai politik yang revolusioner mungkin sekali akan berjuang untuk merubah organisasi pemerintahan yang ada, merubah struktur masyarakat yang sudah mapan, kebudayaan, ataupun ekonomi dari suatu Negara. Dan apabila partai politik tersebut berhasil maka setiap kegiatan yang dipandang penting akan selalu dikendalikan oleh partai. Sebaliknya, partai politik yang konservatif mungkin hanya akan melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang berusaha untuk mempertahankan keadaan yang sudah ada seperti yang sedana berjalan.

Di bawah ini akan diketengahkan fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh partai politik:

#### 1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini partai politik bertindak sebagai penghubung, maksudnya menghubungkan antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah. Partai politik bertindak sebagai penghubung yang menampung arus informasi, baik informasi yang berasal dari pihak penguasa kepada masyarakat maupun yang berasal dari masyarakat kepada pihak penguasa. Oleh karena partai politik menyalurkan informasi dari masyarakat kepada pihak penguasa, maka berarti partai politik mempunyai tugas untuk menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat, serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga semua pendapatan dan aspirasi masyarakat itu bisa tersalurkan.

Sebaliknya partai politik juga menyalurkan informasi yang datangnya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Rencana-rencana atau kebijakan-kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Dengan demikian terjadilah arus informasi timbal balik, dari pihak penguasa kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada penguasa. Dalam menjalankan fungsi ini, partai politik dapat disebut sebagai penyambung atau penyalur informasi.

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik di negara yang menganut paham demokratis jelas berbeda dengan di Negara yang menganut paham otokratis. Di negara yang demokratis, komunikasi politik berlangsung dua arah, yaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pihak penguasa, sedangkan di negara yang otokratis, komunikasi politik hanya berlangsung satu arah saja, yaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat.

Di negara-negara yang otokratis jarang sekali terdapat informasi yang datangnya dari masyarakat kepada pihak penguasa, pendapat-pendapat dan aspirasi-aspirasi masyarakat jarang yang dapat tersalurkan sampai kepada pihak penguasa. Idealnya, informasi yang datangnya dari pihak penguasa kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pihak penguasa haruslah seimbang.

1 Drs. Haryanto, *sistem politik suatu pengantar*, 1982, hal 88 - 89



## 2. Partai Politik Sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Sedikit telah dijelaskan diatas, bahwa partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi maupun tuntutan masyarakat. Oleh karena partai politik mempunyai fungsi tersebut, maka sudah sewajarnya jika partai politik mengaturnya sedemikian rupa agar semua pendapat, aspirasi, maupun tuntutan masyarakat dapat tersalurkan. Proses untuk mengelola dan kemudian merumuskan pendapat, aspirasi, maupun tuntutan masyarakat sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk tuntutan dan dukungan dinamakan artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan ini tidak hanya dijalankan oleh partai politik saja, tetapi artikulasi kepentingan juga dapat dibayangkan serta dijalankan oleh kelompok kepentingan.

Proses penggabungan tuntutan-tuntutan, dukungan-dukungan dan sikap-sikap dari berbagai kelompok yang terdapat didalamnya masyarakat yang sedikit banyak mempunyai persamaan disebut dengan agregasi kepentingan. Sebagaimana halnya dengan artikulasi kepentingan, maka agregasi kepentingan tidak hanya dijalankan oleh partai politik saja, agregasi kepentingan juga dapat dijalankan oleh kelompok-kelompok kepentingan.

## 3. Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai cara untuk mewariskan atau mengajarkan patokan-patokan, keyakinan-keyakinan politik dari suatu generasi yang lebih tua kepada generasi berikutnya. Sehubungan dengan hal itu, partai politik juga memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik, disamping sarana-sarana yang lainnya seperti keluarga, sekolah, dan sebagainya.

Di negara-negara yang sedang berkembang, dimana bangsanya masih sering mempunyai sifat yang heterogen, maka partai politik melalui fungsi sosialisasi politik dapat membantu memupuk integritas bangsa.

Di negara-negara komunis, fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik lebih ditekankan kepada aspek pembinaan

warga negara kearah kehidupan dan cara berpikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan oleh partai. Proses sosialisasi ini dilakukan secara ketat di sekolah, organisasi pemuda, tempat kerja, dan sebagainya. Sebaliknya dalam negara-negara demokratis partai berperan untuk menyelenggarakan integrasi warga negara ke dalam masyarakat umum.<sup>2</sup>

## 4. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik dalam fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjadi anggota partai. Partai politik berusaha untuk menarik minat warga negara agar bersedia menjadi anggota partai. Sehubungan dengan hal itu berarti partai politik turut serta memperluas partisipasi warga negara di bidang politik.

Rekrutmen politik ini merupakan salah satu cara untuk menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin. Pada umumnya cara yang ditempuh oleh partai politik adalah dengan menarik golongan muda untuk untuk dididik dan dijadikan kader, dan dari para kader ini akan nampak anggota-anggota yang mempunyai bakat yang pada gilirannya dapat diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin.

## 5. Partai Politik Sebagai Sarana Pembuatan Kebijakan

Dapatlah dinyatakan bahwa partai politik sebagai sarana pembuatan kebijakan, apabila partai tersebut merupakan partai yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan secara mayoritas mutlak. Apabila partai tersebut hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, maka partai tersebut tidak merupakan sarana pembuatan kebijakan akan tetapi sebagai pengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah.

## 6. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Perbedaan pendapat dan persaingan sudah merupakan suatu hal yang wajar terjadi di negara yang menganut paham demokratis. Di negara-negara yang



menganut paham demokratis perbedaan pendapat dan persaingan tersebut seringkali mengakibatkan terjadinya konflik-konflik dan pertentangan di antara mereka dan apabila itu terjadi maka dapat diselesaikan melalui partai politik. Dalam hal ini partai politik dapat mengatur perbedaan pendapat, persaingan atau bahkan konflik-konflik yang terjadi, sehingga akibat yang ditimbulkan tidak akan merusak integrasi nasional yang telah dibinanya. Apabila partai politik justru melakukan tindakan yang berakibat mempertajam perbedaan pendapat, persaingan, atau konflik, maka akibatnya integritas nasional dapat goyah dan terancam.

#### PENGARUH PARTAI POLITIK DALAM MELAHIRKAN PEMIMPIN NASIONAL

Demokrasi mustahil dapat stabil di sebuah negara, jika negara itu tidak memiliki partai politik yang kuat. Sementara mustahil ada sistem kepartaian yang kuat jika mayoritas penduduk tidak terikat secara emosional dan rasional kepada partai yang ada.

Partai politik telah gagal menjadi representasi politik masyarakat akibatnya aspirasi, harapan, ketakutan, keinginan, politik luas tidak tertangkap dan tersalurkan melalui dunia kepartaian yang ada. Jika publik luas ingin perubahan, keinginan itu juga tidak akan disalurkan melalui partai politik yang ada. Yang kemudian berkembang adalah politik di luar partai, yang lebih sulit dikendalikan dan dikompromikan. Huru-hara dan politik jalanan selalu menjadi alternatif dan saluran bagi kekecewaan politik.

Dunia parlemen akan pula mengalami isolasi yang sama. Mereka yang menjadi anggota DPR atau DPRD melalui partai politik yang ada jika kendaraanya saja seperti partai politik sudah berjarak dengan publik luas, DPR dan DPRD akan pula berjarak. Padahal di DPR dan DPRD itu aneka hukum yang mengatur bulat lonjongnya bentuk Negara. Jika DPR dan DPRD terisolasi dari aspirasi politik masyarakat, maka semua produknya termaksud UU ataupun Perda selalu mungkin tidak mencerminkan apa yang riil berkembang di masyarakat.

Parlemen menjadi asyik dengan ilusi

dan kepentingan politisi di dalamnya. Aneka debat dan konflik di Parlemen murni menggambarkan dinamika anggota parlemen itu sendiri. Dalam konstruksi seperti ini, mustahil pula kita mempunyai Parlemen dengan kepercayaan publik yang tinggi.

Hasil survei CESDA itu menggambarkan partai politik yang ada sudah gagal menjalankan fungsi modernnya selama ini partai hanya diperlakukan sebagai mesin pencetak suara menjelang pemilu saja. Sekali pemilu selesai, dunia kepartaian tidak dikembangkan sebagaimana layaknya partai modern di negara demokrasi yang matang.

Ada beberapa hal yang penting, diantaranya perilaku partai politik. Sebab partai politik yang akan mewakili dan akan memabawa bangsa ini ke depan.

Untuk menakar kinerja partai PDI P dan partai-partai lain dihitung dari pemilu 1999, membaca masalah-masalah yang ada di partai dan kalau dipahami secara linear dari tahun 1999, maka akan ditemukan kesuksesan yang telah dihasilkan oleh pemerintahan Habibie, yaitu: Otonomi Daerah, Kebebasan Pers, dan Pemilu 1999. Pemilu 1999 dikatakan sukses, karena dilihat dari partisipasi politik yang sangat tinggi. Pada waktu itu terdapat 48 partai berlaga dalam pemilu, ada parpol yang lama dan baru. Waktu itu pemerintahan Habibie dimana Golkar hanya meraih 20%. Sementara partai yang relatif baru sudah meluncur. PDI P, walaupun merupakan turunan dari parpol lama yaitu dari PNI lalu PDI dan PDI P, tetapi secara bentuk termaksud baru. Ternyata pemilu 1999, yang disebut oleh sebagian orang sebagai pemilu yang dipersiapkannya tidak matang, pemilunya tidak fair dan pemerintah ikut campur tangan, tetapi hasilnya cukup baik.

Setelah paratai-partai menyodorkan wakil-wakilnya di DPR dan DPRD pasca pemilu 1999 apa yang terjadi secara kuantitatif, Khusus PDIP meraih suara terbanyak, namun demikian masalah tidak selesai sampai disini, masalah kualitas di DPR. Apa yang terjadi di PDIP pada waktu memilih wakil-wakilnya di pusat, propinsi, maupun di kabupaten baru terasa bahwa kualitas anggota memang menjadi hal yang sangat penting sekali, baik dari



aspek produknya maupun moralitasnya. Bayangkan saja teman-teman sebelum duduk di lembaga perwakilan, dilihat dari sisi kemampuan ekonominya maupun dari sisi tingkat intelektualnya sangat lemah. Konsekuensinya dalam menghadapi tantangan dan tanggung jawab, yang paling menonjol adalah kesempatan untuk meningkatkan kepentingan dirinya sendiri. Namun masalah ini bukan hanya terjadi di kubu PDIP secara keseluruhan pun di partai lain seperti itu.

Berbicara sesuatu yang lebih spesifik dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama. Sebelum reformasi, orang yang mau diangkat menjadi anggota DPR, ia harus lewat Bupati atau Gubernur jika hubungan dengan Gubernur atau Bupati tidak baik maka ia tidak akan diberi rekomendasi apapun. Sekarang ini sebaliknya jika mau jadi Bupati atau Gubernur harus dengan baik-baik dengan DPR, jadi situasinya sudah terbalik.

Begitu pula partai politik. Dan kalau partainya ingin baik, ia harus dekat dengan partai politik. karena itu kalau ingin mengukur kinerja partai politik tidak bisa terlalu jauh setidaknya baru dua atau tiga tahun lalu dan akan datang. Dulu kinerja partai itu tergantung situasi yang berkembang dan tanggapan dari pemerintah. Artinya adalah bahwa partai bisa berkembang disituasi yang demokratis. Juga pernah merasakan selama beberapa puluh tahun berada disituasi yang otoriter dan sentralistik.

Memang setelah reformasi, situasi berubah secara drastis dari sentralistik menjadi otonomi, dari otoriter menjadi demokratis, jika melihat demokrasi yang dijalankan Amerika, sangat baik sekali, namun kultur sedikit agak berbeda. Kalau dinegara maju, setiap yang kalah memperlihatkan sikap, lain halnya dinegeri ini, kalau kalah, walaupun secara demokratis, maka pertama ia akan malu, lalu marah, setelah itu jadi musuh. Ini hampir rata terjadi. Pada saat pak Edi Sudrajat kalah dari Akbar Tanjung, dia malu, lalu marah dan mendirikan partai baru. Begitu juga yang lain. Termasuk pemilihan Bupati dan Gubernur. Kalau demokrasi seperti ini, misal pada pemilihan Bupati saja harus dikawal 1000 polisi, berarti yang kita jalankan demokrasi

bukan demokrasi yang penuh kearifan. Akibatnya mengukur partai politik seperti ini akan rumit. Di Asia Tenggara ada tiga negara yang seperti ini yaitu Indonesia, Filipina dan India. Tiga-tiganya tidak maju, sedang tujuan bernegara dan berpolitik adalah maju jika pada akhirnya kacau, berarti harus rethinking, apa yang harus diperbaiki dalam kebijakan politik dewasa ini, sehingga timbullah kinerja dan kejelasan posisi partai-partai tersebut.

Kalau berbicara kinerja, belum banyak yang bisa dinilai. Tidak seperti Pak Harto. Pak Harto bisa dinilai dari segala macam, karena seluruh partai politik waktu itu patuh pada kebijakan pak harto. Kedepan tentu akan dilihat apa yang akan terjadi kalau dilihat dikoran dan televisi, seluruh misi dan visi partai politik itu baik-baik saja semuanya ingin maju, ingin ekonomi kerakyatan, penegakan hukum, semuanya terkait dengan hal-hal yang bagus. Namun begitu pemilihan berlangsung yang keras-keras jatuh, semua visi pasti baik dan terencana, tapi akhirnya, yang akan dinilai adalah aksi dan kinerjanya kedepan.

Kepemimpinan yang akan datang, sekiranya akan berubah secara dinamis mengikuti dinamika bangsa. Pada era 1945, kepemimpinan bersifat revolusioner, karena berhasil memerdekakan bangsa maka terpilihlah Bung Karno selanjutnya Pak Harto terpilih untuk pembangunan dan hasilnya sangat bagus sampai terjadi monopoli dan timbul KKN uang menyebabkan kesenjangan sosial. Semua pemimpin di Negara ini jatuh karena sebab yang sama, yaitu karena inflasi harga tinggi, beras mahal, BBM naik, krisis ekonomi yang parah sehingga rakyat miskin.

Kedepan semua orang berbicara tentang kemakmuran dalam baris krisis kesulitan, tapi kita makmur, kahirnya masalahnya adalah hukum. Bagaimana KKN diberantas, bagaimana mengatur ekonomi secara betul. Dalam hal ini dibutuhkan pemimpin yang mengerti betul persoalan itu. Tapi kembali lagi kepemimpinan itu tergantung pada proses pemilihan diantara partai-partai.

Banyak dikatakan juga bahwa partai politik harus memiliki sejarah yang lama, itu benar. Tapi pelajaran juga buat kita diluar negeri, ada partai baru 6 bulan langsung menang. Jadi menang pemilu adalah suatu yang harus bersih, tidak



lagi ada pengaruh-pengaruh luar dalam memilih, baik itu Camat, Lurah, Kadis, atau apa saja yang sifatnya pribadi. Banyak juga yang mengatakan bahwa pemilu itu nati akan dimenangkan oleh uang. Mungkin itu benar, tapi juga salah. Tahun 1999 partai golakr kalau dilihat jumlah benderanya dan atributnya, pasti lebih banyak. Begitu juga PDIP, tapi yang menang PDIP dan yang menjadi Presiden Abdurrahman Wahid. Kembali pada image, karena waktu itu Gusdur dinilai mampu memperasatukan bangsa dengan berbagai alasan. Jadi apabila partai politik nanti bersaing harus ada pada pertarungan image. Yang penampilannya memiliki kelebihan-kelebihan selain kekurangan yang dimiliki.

Salah satu kasus Indonesia pada saat proses reformasi politik, pada awal mulanya dimulai dari pembenahan tatanan struktur politik Negara bersamaan dengan tatanan struktur politik masyarakat. Misalnya pembuatan produk perundang-undangan yang mengatur eksistensi partai politik.

Pembenahan atau reformasi institusi partai politik ini sebagai respon dari slogan-slogan tuntutan dari rakyat yang menginginkan kebebasan politik dan independen politik masyarakat terhadap Negara yang dijuventahkan pada institusi baru pada partai politik.

#### Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Rudy T. May. *Pengantar Ilmu Politik*, Refika Adikama, Bandung, 2003.
- Thaha Idris. *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Poerwantana. P.K. *Partai Politik Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Suryadi, Budi. *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, IRC, SOD, Yogyakarta, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Kencana, Inu. *Filsafat Politik*, Mandar Maju. Bandung, 2005.
- Haryanto. *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. 1982.
- J.A.Deni, *Memperkuat Pilar Kelima*, Penerbit LKIS, Yogyakarta. 2006 (Halaman 18-21).
- Supriyanto Didin, Toposantoso, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- J.A.Denny, *Napak Tilas Reformasi Politik Indonesia*, LKIS, Yogyakarta. 2006 (halaman 159-220).
- J.A.Denny, *Politik Yang Mencari Bentuk*, LKIS, Yogyakarta 2006.

#### Penutup

Partai politik merupakan instrument penting dalam sebuah Negara demokratis. Olehnya itu, sistem politik, praktisi partai politik dan komponen masyarakat politik lainnya seharusnya memberikan porsi perhatian yang lebih besar terhadap lahirnya partai politik yang tangguh, responsive dan partisipatif. Jika partai politik diposisikan seperti hal tersebut, maka partai politik dapat menjadi wadah yang efektif bagi penyaluran aspirasi masyarakat, termasuk dalam memilih dan memilah calon pemimpin nasional.

Tentunya pemimpin nasional yang lahir dan berakar dari sebuah partai politik yang matang, akan mampu mengagregasi dan kemudian mengartikulasi aspirasi serta kepentingan masyarakatnya. Pemimpin nasional yang semacam ini, tentunya akan dapat mengakar dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Akseptabilitas pemimpin nasional yang bersumber dari partai politik yang andal, responsif dan partisipatif akan mampu menghadirkan sebuah pemerintahan yang stabil, harmonis dan responsif yang pada akhirnya akan berdampak bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.



# III



BHAKTI • DHARMA • WASPADA